



Global Justice and Shared Prosperity:

TANTANGAN EKONOMI ABAD KE-21



PERTUMBUHAN
INKLUSIF



KESETARAAN
GLOBAL



PERLINDUNGAN
SOSIAL



TRANSISI HIJAU

Oleh

Rudy C Tarumingkeng



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

18 April 2026

GLOBAL JUSTICE AND SHARED PROSPERITY: TANTANGAN EKONOMI ABAD KE-21

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara keadilan global dan *shared prosperity* dalam konteks ekonomi abad ke-21 yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak merata, ketimpangan kekayaan yang tajam, stagnasi mobilitas sosial, tekanan utang, fragmentasi perdagangan, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa kemakmuran bersama tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan agregat, melainkan memerlukan tata ekonomi global yang lebih adil, institusi nasional yang lebih inklusif, dan kebijakan publik yang secara aktif memperluas kesempatan bagi kelompok yang tertinggal. Fakta global menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan ekstrem melambat tajam, kemajuan *shared prosperity* pascapandemi tertahan, dan banyak negara berkembang menghadapi tekanan pembiayaan yang menghambat investasi pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di saat yang sama, perubahan teknologi membuka peluang produktivitas baru, tetapi juga berisiko memperlebar jurang antara negara dan kelompok yang memiliki kapasitas inovasi dengan mereka yang sekadar menjadi pasar atau pemasok tenaga kerja murah. Makalah ini menawarkan kerangka strategis yang bertumpu pada enam pilar: pertumbuhan produktif yang inklusif, perlindungan sosial universal, investasi pada kapabilitas manusia, tata digital yang adil,

reformasi arsitektur keuangan dan perdagangan global, serta transisi hijau yang berkeadilan. Dengan demikian, keadilan global tidak boleh dipahami sebagai slogan moral yang abstrak, tetapi sebagai syarat ekonomi dan politik bagi stabilitas serta kemakmuran bersama di abad ini. ([World Bank](#))

Kata kunci: *keadilan global, shared prosperity, ketimpangan, ekonomi abad ke-21, pembangunan inklusif, keadilan iklim, transformasi digital*

Global Justice and Shared Prosperity: Tantangan Ekonomi Abad ke-21

1. Pendahuluan

Abad ke-21 sering digambarkan sebagai masa percepatan besar. Teknologi berkembang dengan laju luar biasa, konektivitas global semakin luas, kapasitas produksi meningkat, dan volume perdagangan internasional telah mencapai tingkat yang pada masa lalu hampir tak terbayangkan. Namun di balik pencapaian itu terdapat paradoks yang sulit diabaikan: semakin besar ekonomi dunia, semakin terasa pula ketimpangan dalam distribusi manfaatnya. Dunia mampu menghasilkan kekayaan, tetapi tidak otomatis mampu membaginya secara adil. Dunia mampu menciptakan inovasi, tetapi tidak otomatis memastikan bahwa inovasi itu memperluas martabat manusia secara merata. Karena itu, perdebatan tentang *global justice* dan *shared prosperity* menjadi salah satu perdebatan paling mendasar dalam ekonomi politik kontemporer. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Istilah *shared prosperity* menandai pergeseran penting dalam cara kita memahami pembangunan. Keberhasilan ekonomi tidak lagi cukup diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau kenaikan investasi, melainkan dari pertanyaan yang lebih menantang: siapa yang sungguh-

sungguh menikmati hasil pertumbuhan itu? Bank Dunia menempatkan *shared prosperity* sebagai bagian inti dari misinya, dan dalam pembaruan terbarunya menegaskan bahwa kemajuan dalam menutup *prosperity gap* global justru melambat sejak pandemi. Dengan kata lain, masalah dunia bukan sekadar kurang tumbuh, tetapi tumbuh dengan distribusi kesempatan dan hasil yang terlalu timpang. ([World Bank](#))

Dalam kerangka itu, keadilan global tidak lagi dapat dilihat semata sebagai wacana normatif. Ia telah menjadi persoalan ekonomi yang sangat konkret. Ketika sebagian negara menikmati akses murah terhadap pembiayaan, teknologi, dan rantai nilai global, sementara negara lain dibebani biaya utang tinggi, ruang fiskal sempit, dan kerentanan iklim yang besar, maka ketimpangan global bukan sekadar akibat kebetulan sejarah. Ia mencerminkan struktur sistem internasional yang tidak sepenuhnya netral. Laporan pembiayaan pembangunan PBB 2026 memperingatkan bahwa banyak negara berkembang sedang menghadapi *financing squeeze* yang ditandai oleh tingginya biaya pinjaman, beban pembayaran utang, dan basis pajak yang lemah. Kondisi ini membuat pembangunan manusia dan transformasi ekonomi berjalan jauh lebih lambat dibanding kebutuhan nyata masyarakatnya. ([desapublications.un.org](#))

Karena itu, makalah ini berangkat dari satu tesis utama: kemakmuran bersama pada abad ke-21 hanya mungkin diwujudkan apabila dunia menata ulang hubungan antara pertumbuhan, distribusi, perlindungan sosial, perdagangan, teknologi, dan keberlanjutan ekologis. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia memerlukan keadilan global, melainkan bentuk keadilan global seperti apa yang realistis, operasional, dan relevan bagi ekonomi yang saling terhubung tetapi juga semakin terfragmentasi. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

2. Memahami Keadilan Global dan Shared Prosperity

Secara substantif, keadilan global dapat dipahami sebagai prinsip bahwa tatanan ekonomi internasional seharusnya memberi peluang yang layak bagi semua negara dan semua kelompok sosial untuk berkembang, bukan

hanya menguntungkan mereka yang sejak awal sudah memiliki modal, teknologi, dan posisi tawar yang kuat. Dalam pengertian ini, keadilan bukan identik dengan keseragaman hasil, melainkan dengan keterbukaan kesempatan, pengurangan hambatan struktural, serta penyediaan perlindungan terhadap ketidakberuntungan yang tidak dipilih seseorang atau suatu bangsa. Keadilan global dengan demikian berhubungan erat dengan kualitas aturan permainan internasional. Jika aturan itu cenderung mereproduksi ketimpangan, maka bahkan pertumbuhan tinggi pun akan meninggalkan kelompok dan negara tertentu di pinggiran. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Adapun *shared prosperity* adalah gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi baru layak disebut berhasil jika pendapatan atau kesejahteraan kelompok bawah meningkat secara bermakna. Bank Dunia menggunakan pertumbuhan kesejahteraan 40 persen terbawah sebagai salah satu ukuran penting dari pertumbuhan inklusif, lalu melengkapinya dengan ukuran baru berupa *Global Prosperity Gap*, yaitu rata-rata kekurangan pendapatan terhadap standar kemakmuran global. Ukuran ini penting karena ia membantu kita melihat bahwa masalah utama dunia bukan hanya ekstremitas kemiskinan, tetapi juga jarak yang terlalu lebar antara kehidupan minimal yang bertahan dan kehidupan yang layak disebut sejahtera. Pada 2024, *global prosperity gap* masih besar, dengan kontribusi terbesar datang dari wilayah-wilayah termiskin, terutama Sub-Sahara Afrika. ([World Bank](#))

Konsep ini membawa implikasi teoretis yang penting. Pertama, kemakmuran bersama tidak identik dengan redistribusi sesudah pertumbuhan. Ia menuntut pertumbuhan itu sendiri dirancang sedemikian rupa agar penciptaan nilai ekonomi juga memperluas partisipasi. Kedua, keadilan global tidak dapat direduksi menjadi bantuan kemanusiaan. Bantuan memang penting dalam keadaan darurat, tetapi ia tidak menggantikan kebutuhan akan sistem perdagangan, pembiayaan, perpajakan, teknologi, dan tata kelola yang lebih adil. Ketiga, kesejahteraan

harus dilihat secara multidimensi. Seseorang tidak cukup disebut sejahtera hanya karena pendapatannya naik bila ia tetap tidak terlindungi ketika sakit, tidak memiliki akses digital, atau hidup di lingkungan yang rentan terhadap guncangan iklim. ([World Health Organization](#))

Di titik ini, terlihat bahwa *shared prosperity* sesungguhnya adalah jembatan antara ekonomi dan etika. Ia menghubungkan efisiensi dengan martabat manusia. Masyarakat yang terlalu timpang bukan hanya bermasalah secara moral, tetapi juga secara ekonomi: konsumsi rumah tangga rapuh, mobilitas sosial rendah, investasi jangka panjang terhambat, dan legitimasi politik melemah. OECD menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan jauh lebih tajam daripada ketimpangan pendapatan; rata-rata rumah tangga di 10 persen teratas menguasai lebih dari separuh total kekayaan rumah tangga. Ketika kekayaan terkonsentrasi setajam itu, kesempatan untuk memanfaatkan pendidikan, investasi, jaringan, dan perlindungan risiko juga ikut terkonsentrasi. ([OECD](#))

3. Peta Tantangan Ekonomi Abad ke-21

3.1 Pertumbuhan yang Melambat dan Kemiskinan yang Sulit Surut

Tantangan pertama adalah melemahnya kemampuan pertumbuhan global untuk mengurangi kemiskinan secara cepat. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada lintasan saat ini, 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan 3,4 miliar orang kemungkinan masih hidup dengan kurang dari 6,85 dolar AS per hari. Lembaga yang sama menyebut periode 2020–2030 berisiko menjadi “dekade yang hilang” bagi pengurangan kemiskinan karena laju perbaikannya nyaris berhenti. Ini adalah peringatan serius bahwa pertumbuhan global saat ini tidak cukup cepat, tidak cukup inklusif, atau keduanya sekaligus. ([World Bank](#))

UNCTAD memperkuat gambaran ini ketika menyatakan bahwa pertumbuhan global yang bertahan di sekitar 2,7 persen terlalu lemah untuk secara berarti menekan ketimpangan, mempercepat transisi iklim, dan meredam ketidakpuasan sosial. Artinya, dunia sedang menghadapi

bukan hanya masalah jumlah pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Banyak negara berkembang tumbuh, tetapi tidak tumbuh cukup cepat untuk mengejar negara maju. Lebih buruk lagi, sebagian negara tumbuh dengan pola yang sangat rentan terhadap guncangan harga komoditas, biaya utang, dan volatilitas modal. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dari sisi keadilan global, fakta ini penting karena menunjukkan bahwa waktu sejarah tidak berjalan merata. Negara-negara kaya dapat membicarakan produktivitas frontier, AI generatif, dan transisi hijau berteknologi tinggi, sementara banyak negara miskin masih berkutat dengan pangan, listrik, pembiayaan dasar, dan akses kesehatan. Ketimpangan pembangunan dengan demikian bukan hanya ketimpangan pendapatan saat ini, tetapi ketimpangan waktu: sebagian masyarakat hidup dalam "masa depan", sementara yang lain masih berjuang menuntaskan kebutuhan "masa lalu." ([Human Development Reports](#))

3.2 Ketimpangan Pendapatan, Kekayaan, dan Mobilitas Sosial

Tantangan kedua adalah ketimpangan yang terus mengeras dalam bentuk pendapatan, kekayaan, dan peluang. OECD menunjukkan bahwa rumah tangga pada 10 persen teratas rata-rata menguasai 52 persen total kekayaan rumah tangga. Angka ini jauh melampaui konsentrasi pendapatan tahunan. Ketika kekayaan terkonsentrasi, keuntungan ekonomi berlipat: aset menghasilkan pendapatan pasif, agunan memudahkan akses kredit, dan kemampuan menanggung risiko membuka kesempatan usaha dan pendidikan yang lebih besar. Akibatnya, pasar tidak lagi menjadi arena kompetisi yang setara, melainkan arena yang dari awal sudah condong kepada mereka yang memiliki bantalan aset. ([OECD](#))

Bank Dunia menegaskan bahwa tingginya ketimpangan sering mencerminkan kurangnya peluang mobilitas sosial ekonomi dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan inklusif. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya bahwa si kaya menjadi lebih kaya, tetapi bahwa si miskin makin sulit mengejar. Ketimpangan semacam ini amat berbahaya

secara sosial karena melahirkan persepsi bahwa sistem ekonomi tidak lagi adil. Ketika kerja keras, pendidikan, dan disiplin tidak cukup untuk naik kelas sosial, kepercayaan terhadap institusi ekonomi akan menurun. ([World Bank](#))

Ilustrasi sederhananya dapat dilihat pada dua lulusan universitas dengan kemampuan relatif setara. Yang satu berasal dari keluarga mapan, memiliki koneksi profesional, perangkat digital lengkap, dan modal awal untuk magang tidak berbayar atau memulai usaha kecil. Yang lain berasal dari keluarga rapuh, harus segera bekerja apa saja, menanggung beban rumah tangga, dan tidak memiliki bantalan ketika gagal. Secara formal mereka hidup di pasar yang sama, tetapi secara substantif mereka tidak memulai dari garis yang sama. Dalam skala global, perbedaan semacam ini tercermin pada jurang antara negara yang memiliki ekosistem inovasi dan negara yang hanya menjadi konsumen inovasi. ([Open Knowledge Repository](#))

3.3 Pasar Kerja yang Rapuh dan Informalitas yang Luas

Tantangan ketiga adalah rapuhnya pasar kerja global. ILO dalam *World Employment and Social Outlook 2025* mencatat bahwa kesenjangan pekerjaan global masih sangat besar: sekitar 186 juta orang menganggur, dan jutaan lainnya berada di luar angkatan kerja potensial sebagai pekerja yang putus asa atau terhambat masuk pasar kerja. Pembaruan ILO pada Mei 2025 juga menyatakan prospek ekonomi dan pasar kerja 2025 semakin rapuh, dengan proyeksi pertumbuhan global direvisi turun menjadi 2,8 persen. Ini penting karena pekerjaan tetap merupakan mekanisme utama yang menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan rumah tangga. Bila pertumbuhan tidak menciptakan pekerjaan bermutu, maka manfaatnya tidak akan menyebar. ([International Labour Organization](#))

Lebih dari itu, pekerjaan yang tersedia sering kali bukan pekerjaan yang memberi perlindungan dan mobilitas. Informalitas, kontrak rapuh, rendahnya upah, dan keterputusan dari perlindungan sosial membuat sebagian besar pekerja rentan terhadap setiap guncangan. Dalam keadaan

seperti itu, pertumbuhan pendapatan rumah tangga tidak stabil, kemampuan menabung rendah, dan investasi pada pendidikan anak mudah terganggu. Karena itu, keadilan ekonomi abad ke-21 harus mencakup hak atas pekerjaan yang produktif dan aman, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja secara statistik. ([International Labour Organization](#))

Secara naratif, pekerja informal di kota-kota besar sering tampak “masuk” ke ekonomi modern karena memakai platform digital, telepon pintar, dan sistem pembayaran elektronik. Tetapi di balik kesan modern itu, banyak dari mereka tetap hidup tanpa jaminan kesehatan yang memadai, tanpa perlindungan hari tua, dan tanpa kepastian pendapatan. Mereka berpartisipasi dalam ekonomi abad ke-21, tetapi belum sepenuhnya menikmati institusi penyangga abad ke-21. Di sinilah shared prosperity menuntut integrasi antara pertumbuhan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. ([International Labour Organization](#))

3.4 Kesenjangan dalam Kesehatan, Pendidikan, dan Konektivitas

Tantangan keempat adalah bahwa ketidakadilan ekonomi semakin nyata melalui layanan dasar. WHO melaporkan bahwa pada 2023 sekitar 4,6 miliar orang belum sepenuhnya tercakup oleh layanan kesehatan esensial, dan pada 2022 sekitar 2,1 miliar orang mengalami kesulitan finansial akibat biaya kesehatan dari kantong sendiri. Dari jumlah itu, 1,6 miliar hidup dalam kemiskinan atau terdorong lebih dalam ke dalam kemiskinan karena biaya kesehatan. Ini berarti sakit masih menjadi jalur yang sangat efektif menuju kemiskinan di banyak bagian dunia. ([World Health Organization](#))

Di bidang pendidikan, UNESCO melaporkan 251 juta anak dan remaja masih berada di luar sekolah secara global. Kemajuan selama hampir satu dekade juga sangat lambat. Kesenjangan pembiayaan pendidikan antara negara kaya dan miskin tetap ekstrem. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak hanya menghadapi masalah akses, tetapi juga masalah kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan memperlemah produktivitas, memperkecil mobilitas sosial, dan

menurunkan kemampuan negara berkembang untuk berpartisipasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. ([UNESCO](#))

Kesenjangan digital menambah lapisan ketidakadilan baru. ITU melaporkan bahwa pada 2025 sekitar 2,2 miliar orang masih offline, sementara pada 2024 jumlahnya sekitar 2,6 miliar. Di banyak negara berpendapatan rendah, tingkat konektivitas jauh tertinggal dari negara berpendapatan tinggi. Dengan makin pentingnya layanan pendidikan daring, layanan keuangan digital, administrasi publik digital, dan pemanfaatan AI, ketertinggalan digital bukan lagi masalah teknis semata. Ia telah menjadi bentuk baru ketertinggalan sosial ekonomi. ([ITU](#))

3.5 Krisis Pembiayaan Pembangunan dan Ketimpangan Fiskal

Tantangan kelima adalah sempitnya ruang fiskal, terutama di negara berkembang. Laporan PBB tentang pembiayaan pembangunan 2026 menggambarkan adanya *financing squeeze* akibat tingginya biaya pinjaman, besarnya beban utang, dan penerimaan pajak yang strukturalnya lemah. Sementara itu, forum kerja sama pembangunan PBB 2025 menyebut negara-negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan SDGs hingga sekitar 4 triliun dolar AS per tahun. Ketika negara tidak memiliki ruang fiskal, mereka cenderung menunda investasi pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial. Akibatnya, ketimpangan global makin mengeras bukan hanya karena pasar, tetapi karena ketimpangan kapasitas negara.

(desapublications.un.org)

Inilah salah satu titik paling penting dalam diskusi keadilan global. Negara maju dapat membiayai transisi energi, subsidi industri strategis, dan perlindungan sosial lebih luas karena biaya pembiayaannya relatif rendah. Sebaliknya, negara berkembang sering harus memilih antara stabilitas fiskal jangka pendek dan investasi sosial jangka panjang. Pilihan ini tampak teknis, tetapi sesungguhnya sangat politis dan etis. Dunia yang benar-benar adil tidak seharusnya memaksa negara miskin membayar bunga mahal hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. ([IMF](#))

3.6 Fragmentasi Perdagangan, Geopolitik, dan Risiko Baru

Tantangan keenam adalah fragmentasi perdagangan dan geopolitik. WTO dalam *Global Trade Outlook and Statistics* Maret 2026 memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang global turun dari 4,6 persen pada 2025 menjadi 1,9 persen pada 2026 dalam skenario dasar. WTO juga memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah dan harga energi yang tinggi dapat memangkas lagi pertumbuhan perdagangan, sementara ledakan permintaan atas barang-barang terkait AI menjadi faktor penahan. Gambaran ini menunjukkan bahwa ekonomi global kini bergerak dalam ketidakpastian yang sangat dipengaruhi geopolitik dan teknologi. ([World Trade Organization](#))

Perdagangan global tentu tetap penting bagi kemakmuran bersama. Tetapi dunia tidak lagi dapat menganggap perdagangan selalu otomatis membawa konvergensi pembangunan. UNCTAD mengingatkan bahwa peningkatan arus perdagangan tidak selalu disertai kemajuan pembangunan yang merata, dan tanpa langkah yang berani jarak antara negara kaya dan miskin dapat makin melebar. Dalam situasi ketika nilai tambah tinggi terkonsentrasi pada teknologi, desain, paten, data, dan layanan canggih, banyak negara berkembang berisiko tetap terjebak pada posisi bernilai tambah rendah. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Di sisi lain, AI membuka pertanyaan besar bagi shared prosperity. UNDP dalam *Human Development Report 2025* menekankan bahwa masa depan pembangunan bergantung bukan pada apa yang AI dapat lakukan sendirian, melainkan pada pilihan kebijakan dan sosial yang diambil manusia agar AI memperluas kapabilitas. Ini berarti AI bisa menjadi mesin demokratisasi produktivitas, tetapi juga bisa menjadi mesin sentralisasi kekayaan jika akses komputasi, data, talenta, dan infrastruktur hanya dikuasai oleh segelintir negara atau perusahaan. ([Human Development Reports](#))

4. Mengapa Keadilan Global Sulit Diwujudkan?

Salah satu alasan utamanya ialah bahwa ekonomi global dibangun di atas asimetri historis. Negara-negara yang lebih dahulu mengakumulasi modal, membangun institusi keuangan, mengembangkan teknologi, dan menguasai jalur perdagangan memperoleh keunggulan yang terus berlanjut. Keunggulan itu bukan hanya terwujud dalam pendapatan nasional, melainkan juga dalam kemampuan menetapkan standar, mengendalikan arus modal, mempengaruhi harga teknologi, dan merancang narasi legitimasi tentang apa yang dianggap “kebijakan baik”. Dalam banyak kasus, negara berkembang justru diminta terbuka dan disiplin pada saat negara maju sendiri melindungi sektor strategisnya ketika diperlukan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Keadilan global juga sulit diwujudkan karena mekanisme pasar global sering mengabaikan distribusi kekuasaan. Pasar diasumsikan netral, padahal pelaku yang masuk ke pasar memiliki kapasitas yang sangat berbeda. Negara dengan teknologi tinggi dapat menangkap nilai tambah besar dari inovasi, sementara negara lain hanya menyediakan bahan mentah, tenaga kerja murah, atau pasar konsumen. Dalam ekonomi digital, masalah ini bisa makin tajam karena skala dan data menciptakan efek pemenang-mengambil-sebagian-besar. Jika aturan persaingan, perpajakan, dan transfer teknologi tidak memadai, maka shared prosperity akan sulit tercapai walaupun perdagangan dan investasi terus bertambah. ([Open Knowledge Repository](#))

Faktor lain ialah ketimpangan dalam ketahanan terhadap guncangan. Perubahan iklim, pandemi, konflik, dan fluktuasi harga energi tidak menghantam semua negara dengan intensitas yang sama. Bank Dunia menekankan bahwa hampir satu dari lima orang di dunia berisiko mengalami kerugian kesejahteraan akibat peristiwa cuaca ekstrem yang sulit dipulihkan. Jika negara miskin juga memiliki kapasitas fiskal rendah dan perlindungan sosial lemah, maka setiap guncangan akan memperlebar ketertinggalan. Dalam arti ini, keadilan global juga menuntut distribusi

kapasitas untuk pulih, bukan hanya distribusi pendapatan saat ini. ([World Bank](#))

Akhirnya, keadilan global sulit terwujud karena ada ketegangan antara logika nasional dan logika internasional. Pemerintah dipilih oleh warga negaranya dan cenderung memprioritaskan kepentingan domestik jangka pendek, sementara banyak masalah ekonomi abad ke-21—iklim, pajak perusahaan multinasional, regulasi AI, utang, migrasi, dan kestabilan perdagangan—bersifat lintas batas. Tanpa kerja sama yang efektif, negara akan tergoda mengambil jalan sempit yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan sistem secara keseluruhan. Di sinilah global justice memerlukan bukan hanya idealisme, tetapi arsitektur kelembagaan yang membuat kerja sama menjadi rasional. ([United Nations](#))

5. Pilar Strategi Menuju Shared Prosperity yang Lebih Adil

5.1 Pertumbuhan Produktif yang Inklusif

Pilar pertama adalah pertumbuhan produktif yang sengaja didesain agar inklusif. Negara memerlukan strategi industrial, pengembangan UMKM, kebijakan keterampilan, dan investasi infrastruktur yang mendorong penciptaan pekerjaan bermutu. Bank Dunia menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan shared prosperity membutuhkan pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus lebih inklusif, terutama dengan menumbuhkan pendapatan tenaga kerja melalui lebih banyak dan lebih baik pekerjaan. Artinya, keadilan distribusi tidak dapat dipisahkan dari strategi produksi. ([World Bank](#))

Dalam praktiknya, pertumbuhan inklusif berarti memperkuat sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan keterkaitan domestik dalam rantai nilai, dan menghindari model pertumbuhan yang terlalu bergantung pada rente sempit. Negara juga perlu berani memadukan kebijakan industri dengan kebijakan persaingan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tanpa itu, ekonomi hanya akan tumbuh di kantong-kantong

tertentu dan gagal menghasilkan efek rambatan yang luas. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

5.2 Perlindungan Sosial Universal

Pilar kedua ialah perlindungan sosial universal. ILO melaporkan bahwa untuk pertama kalinya lebih dari separuh penduduk dunia, yakni 52,4 persen, tercakup setidaknya oleh satu manfaat perlindungan sosial, tetapi 47,6 persen sisanya masih sama sekali tidak terlindungi. Ini adalah kemajuan sekaligus peringatan. Dalam ekonomi yang semakin rawan guncangan, perlindungan sosial bukan kemewahan fiskal, melainkan infrastruktur kelembagaan yang menjaga manusia tetap bisa bertahan, belajar, dan memproduksi. ([International Labour Organization](#))

Perlindungan sosial yang kuat juga penting bagi legitimasi ekonomi pasar. Tanpa jaring pengaman, masyarakat akan melihat pasar sebagai mekanisme yang memberi keuntungan saat sukses tetapi meninggalkan mereka sendirian saat gagal. Sebaliknya, sistem perlindungan yang baik memungkinkan masyarakat mengambil risiko produktif karena mereka tahu kegagalan tidak selalu berarti kehancuran total. Dalam arti ini, perlindungan sosial bukan lawan dari dinamisme ekonomi, melainkan syarat psikologis dan institusional bagi dinamisme yang berkelanjutan. ([International Labour Organization](#))

5.3 Investasi pada Kapabilitas Manusia

Pilar ketiga adalah investasi yang serius pada kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Data WHO dan UNESCO menunjukkan besarnya defisit layanan dasar global. Karena itu, strategi kemakmuran bersama harus melihat pengeluaran sosial bukan hanya sebagai konsumsi negara, tetapi sebagai investasi jangka panjang pada produktivitas dan kohesi sosial. Anak yang sehat dan bersekolah dengan baik bukan hanya hasil kebijakan kesejahteraan, tetapi juga fondasi pertumbuhan masa depan. ([World Health Organization](#))

Dalam konteks abad ke-21, investasi pada kapabilitas manusia juga mencakup literasi digital dan kemampuan bekerja bersama teknologi. UNDP menekankan bahwa AI semestinya diperlakukan sebagai alat untuk memperluas kemampuan manusia, bukan menggantikannya secara membabi buta. Ini mengharuskan negara mengembangkan pendidikan yang lebih adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan sistem pelatihan ulang yang memungkinkan pekerja berpindah lintas sektor seiring transformasi ekonomi. ([Human Development Reports](#))

5.4 Tata Digital yang Adil

Pilar keempat adalah tata digital yang adil. Dunia tidak boleh membiarkan transformasi digital menciptakan oligarki baru berbasis data, komputasi, dan akses platform. Kesenjangan digital yang masih sangat besar, sebagaimana dicatat ITU, menunjukkan bahwa akses saja belum merata. Tetapi persoalannya lebih dalam: siapa yang memproduksi teknologi, siapa yang menguasai model AI, siapa yang memiliki pusat data, dan siapa yang hanya menjadi pengguna pasif? Global justice di era digital menuntut agar negara berkembang memiliki ruang untuk membangun kapasitas digitalnya sendiri. ([ITU](#))

Secara kebijakan, ini berarti investasi pada infrastruktur digital, keterjangkauan internet, interoperabilitas sistem pembayaran, perlindungan data, dan kebijakan persaingan terhadap dominasi platform besar. Di tingkat global, diperlukan kerja sama agar transfer pengetahuan, standar interoperabilitas, dan tata kelola AI tidak ditentukan sepihak oleh aktor yang paling kuat. Jika tidak, shared prosperity digital akan berubah menjadi *shared dependency*. ([ITU](#))

5.5 Reformasi Arsitektur Keuangan dan Perdagangan Global

Pilar kelima adalah reformasi sistem pembiayaan dan perdagangan. Kesenjangan pembiayaan pembangunan yang sangat besar dan mahal biaya utang menuntut reformasi serius pada pembiayaan multilateral, restrukturisasi utang, penguatan kapasitas perpajakan, dan instrumen

pembiayaan pembangunan yang lebih adil. Negara berkembang membutuhkan akses pembiayaan jangka panjang dengan biaya yang tidak mematikan ruang belanja sosialnya. Tanpa reformasi ini, seruan moral tentang keadilan global akan kehilangan makna operasional.

(desapublications.un.org)

Dalam perdagangan, tujuannya bukan menghapus globalisasi, melainkan memperbaikinya. WTO menunjukkan perdagangan tetap penting dan cukup dinamis, tetapi juga rentan terhadap guncangan geopolitik. Karena itu, perdagangan yang adil harus memberi lebih banyak ruang bagi pembangunan nilai tambah lokal, diversifikasi ekspor, dan penguatan kapasitas industri di negara berkembang. UNCTAD dengan tepat menyerukan pemikiran ulang atas strategi pembangunan agar globalisasi tidak hanya mempercepat sirkulasi barang, tetapi juga memperluas pembangunan yang substantif. ([World Trade Organization](https://www.wto.org))

5.6 Transisi Hijau yang Berkeadilan

Pilar keenam adalah transisi hijau yang berkeadilan. Tidak ada shared prosperity yang berkelanjutan bila fondasi ekologisnya runtuh. Namun keadilan iklim mengharuskan biaya transisi tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh negara dan masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim. Negara berkembang memerlukan ruang fiskal, transfer teknologi, dan pembiayaan adaptasi agar transisi hijau tidak berubah menjadi beban tambahan bagi mereka. ([World Bank](https://www.worldbank.org))

Dalam praktiknya, transisi hijau yang adil harus menghubungkan kebijakan energi, pangan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Misalnya, pekerja pada sektor yang akan menurun karena dekarbonisasi perlu dibantu melalui pelatihan ulang, perlindungan pendapatan, dan penciptaan kesempatan baru. Demikian pula komunitas rentan iklim membutuhkan perlindungan adaptif, bukan sekadar pidato tentang keberlanjutan. Dengan demikian, green economy yang adil bukan hanya soal emisi, tetapi soal distribusi manfaat dan beban perubahan. ([International Labour Organization](https://www.ilo.org))

6. Ilustrasi Naratif: Tiga Wajah Ketidakadilan Global

Bayangkan seorang anak di negara berpendapatan rendah yang cerdas dan ingin menjadi insinyur. Ia hidup di wilayah yang koneksi internetnya lemah, sekolahnya kekurangan guru, dan keluarganya tidak punya jaminan kesehatan. Secara formal dunia mengatakan bahwa abad ke-21 adalah abad kesempatan digital. Tetapi bagi anak itu, dunia digital tetaplah dunia yang dilihat dari kejauhan. Ketika kita berbicara tentang shared prosperity, kita sesungguhnya sedang bertanya apakah sistem global memberi anak itu peluang riil untuk masuk ke masa depan, atau sekadar menjadikannya penonton dari kemajuan orang lain. Ilustrasi ini serasi dengan temuan UNESCO, WHO, dan ITU tentang defisit pendidikan, kesehatan, dan konektivitas global. ([UNESCO](#))

Bayangkan pula seorang pekerja perempuan di kota besar yang bekerja melalui aplikasi digital. Ia fleksibel, terhubung, dan tampak modern. Tetapi ia tidak memiliki jaminan penghasilan minimum, tidak mendapat perlindungan maternitas yang memadai, dan dapat kehilangan pendapatan bila sakit beberapa hari saja. Ia adalah simbol ekonomi baru yang inovatif, tetapi sekaligus simbol pasar kerja yang rapuh. Dalam kasus seperti ini, teknologi tanpa institusi keadilan hanya memperhalus bentuk lama dari kerentanan. ([International Labour Organization](#))

Gambaran ketiga adalah sebuah negara berkembang yang ingin melakukan industrialisasi hijau dan digitalisasi layanan publik, tetapi harus membayar bunga pinjaman jauh lebih mahal daripada negara maju. Negara ini tahu apa yang harus dilakukan: membangun infrastruktur, memperkuat pendidikan teknik, memperluas internet, dan meningkatkan perlindungan sosial. Namun ruang fiskalnya sempit karena pembayaran utang dan biaya pembiayaan tinggi. Di titik ini, kegagalan pembangunan bukan selalu karena kurangnya visi domestik, melainkan juga karena aturan pembiayaan global yang tidak simetris. ([desapublications.un.org](#))

7. Relevansi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi Indonesia dan banyak negara berkembang lain, perdebatan tentang keadilan global dan shared prosperity sangat relevan karena negara-negara ini hidup di persimpangan antara peluang besar dan kerentanan besar. Di satu sisi, ada bonus demografi, pasar domestik yang luas, potensi hilirisasi, ekonomi digital, serta kemungkinan mendapat manfaat dari relokasi rantai pasok global. Di sisi lain, ada tantangan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, informalitas, ketimpangan wilayah, dan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar untuk infrastruktur sosial serta transisi energi. Karena itu, shared prosperity tidak bisa hanya diserahkan pada mekanisme pasar atau investasi asing semata. ([World Trade Organization](#))

Pelajaran penting dari diskusi global adalah bahwa negara berkembang harus membangun strategi ganda. Pertama, memperkuat kapasitas domestik: produktivitas, institusi fiskal, kualitas SDM, kesehatan publik, dan infrastruktur digital. Kedua, aktif memperjuangkan reformasi global: akses pembiayaan yang lebih adil, ruang kebijakan industri, tata digital yang lebih seimbang, dan pembiayaan iklim yang lebih memadai. Tanpa strategi ganda ini, negara berkembang berisiko sekadar menjadi arena persaingan global, bukan pelaku yang menentukan arahnya. ([desapublications.un.org](#))

Dalam konteks Indonesia, shared prosperity juga menuntut perhatian pada ketimpangan antardaerah dan antara sektor formal-informal. Pertumbuhan nasional yang baik belum cukup bila kelompok yang tertinggal tidak memperoleh akses yang nyata pada layanan dasar, konektivitas, dan pekerjaan produktif. Karena itu, gagasan keadilan global sebaiknya diterjemahkan juga ke tingkat nasional sebagai keadilan pembangunan antarwilayah, antarkelas, dan antargenerasi. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya menuntut keadilan dari sistem global, tetapi juga membangunnya di dalam rumahnya sendiri. ([World Bank](#))

8. Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi abad ke-21 tidak dapat dipahami hanya melalui lensa pertumbuhan. Pertumbuhan tetap

penting, tetapi ia tidak cukup. Dunia menghadapi kombinasi masalah yang saling terkait: perlambatan pengurangan kemiskinan, stagnasi shared prosperity, ketimpangan kekayaan yang tajam, pasar kerja yang rapuh, defisit layanan dasar, kesenjangan digital, ruang fiskal yang sempit, fragmentasi perdagangan, dan ketidakpastian teknologi. Karena itu, keadilan global bukan isu tambahan di pinggiran ekonomi; ia justru berada di pusat pertanyaan tentang bagaimana ekonomi global seharusnya bekerja. ([World Bank](#))

Shared prosperity pada hakikatnya adalah upaya menjembatani produktivitas dan martabat manusia. Ia menghendaki agar pertumbuhan dibangun bersama, bukan hanya dinikmati bersama setelah selesai. Ia menuntut agar aturan perdagangan, pembiayaan, teknologi, dan perlindungan sosial disusun sedemikian rupa sehingga mereka yang paling lemah tidak selalu menjadi pihak yang paling menanggung biaya perubahan. Dalam dunia yang makin terdigitalisasi dan makin terdampak iklim, prinsip ini menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. ([Human Development Reports](#))

Akhirnya, keadilan global harus dipahami sebagai proyek praktis. Ia bukan mimpi tentang dunia tanpa perbedaan, melainkan usaha untuk memastikan bahwa perbedaan kekuatan dan posisi awal tidak berubah menjadi kutukan permanen. Dunia yang adil bukan dunia di mana semua orang identik, melainkan dunia di mana semua orang memiliki peluang yang masuk akal untuk hidup sehat, belajar, bekerja bermartabat, dan berharap. Jika abad ke-21 ingin dikenang sebagai abad kemajuan manusia, maka ukuran terbesarnya bukanlah seberapa pintar teknologinya, melainkan seberapa luas kemakmurannya benar-benar dibagikan. ([World Health Organization](#))

Glosarium

Global Justice

Prinsip bahwa tatanan ekonomi dan politik internasional seharusnya memberi peluang yang adil bagi semua negara dan semua kelompok manusia untuk berkembang.

Shared Prosperity

Konsep pembangunan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah, bukan hanya kelompok yang sudah kuat.

Global Prosperity Gap

Ukuran Bank Dunia tentang rata-rata kekurangan pendapatan terhadap standar kemakmuran global tertentu.

Inclusive Growth

Pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan kerja, pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar secara lebih merata.

Informalitas

Kondisi pekerjaan atau usaha yang berada di luar perlindungan formal, seperti jaminan sosial, kontrak kerja yang kuat, dan kepastian hak.

Ruang Fiskal

Kemampuan pemerintah untuk membiayai kebijakan publik tanpa menciptakan risiko fiskal yang tidak berkelanjutan.

Financing Squeeze

Tekanan pembiayaan yang ditandai oleh mahalnya biaya pinjaman, tingginya pembayaran utang, dan lemahnya pendapatan negara.

Universal Health Coverage (UHC)

Keadaan ketika semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Kesenjangan Digital

Perbedaan akses, keterjangkauan, kualitas konektivitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Transisi Hijau yang Adil

Peralihan menuju ekonomi rendah karbon yang memastikan pekerja dan komunitas rentan tidak ditinggalkan.

Referensi (APA 7)

International Labour Organization. (2024). *World social protection report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition*. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2024). *World social protection report 2024–26: In figures*. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: May 2025 update*. ([International Labour Organization](#))

International Telecommunication Union. (2024). *Facts and figures 2024: Internet use*. ([ITU](#))

International Telecommunication Union. (2025). *Facts and figures 2025*. ([ITU](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Society at a glance 2024: Income and wealth inequalities*. ([OECD](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Trade and development report 2024: Rethinking development in the age of discontent*. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Inequality: Major trends, policy challenges and the need for global economic compact*. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2026). *Financing for sustainable development report 2026*. ([desapublications.un.org](#))

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI*. ([Human Development Reports](#))

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2024). *Global education monitoring report 2024/5: Monitoring SDG 4*. ([UNESCO](#))

United Nations. (2025). *Development Cooperation Forum 2025*. ([Financing for Sustainable Development](#))

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024*. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Growth of the bottom 40: Monitoring inclusive growth*. ([World Bank](#))

World Health Organization. (2025). *Universal health coverage (UHC)*. ([World Health Organization](#))

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics: March 2026*. ([World Trade Organization](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Global Justice and Shared Prosperity: Tantangan
Ekonomi Abad ke-21*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 18 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69e37d13-089c-8398-940b-27e15276b370>